

**SINKRONISASI DEFINISI AKAD-AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(POJK) : SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

Studi Perpustakaan di Pengadilan Agama Boyolali



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

Faizal Dewantara

C100136001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Sinkronisasi Definisi Akad-akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Sengketa Ekonomi Syariah**

Di Pengadilan Agama

Studi Perpustakaan di Pengadilan Agama Boyolali

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

FAIZAL DEWANTARA

C100136001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wardah Yuspin', with a large, stylized initial 'W'.

(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.)

HALAMAN PENGESAHAN

**SINKRONISASI DEFINISI AKAD-AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) : SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

Studi Perpustakaan di Pengadilan Agama Boyolali

Yang ditulis oleh :

FAIZAL DEWANTARA

C100136001

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 6 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.

Anggota : Inayah, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,



FAIZAL DEWANTARA

C.100.136.001

**SINKRONISASI DEFINISI AKAD-AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(POJK) : SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
Studi Perpustakaan di Pengadilan Agama Boyolali**

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja tidak lepas dari permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang LKS. Terdapat dua aturan yang mengatur tentang LKS yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Rumusan masalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana bagan alur perkara di pengadilan agama, bagaimana peran KHES terhadap hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, serta bagaimana penyelesaian apabila terdapat perbedaan persepsi antara POJK dan KHES terhadap sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Boyolali.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Peraturan, Sengketa Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Sharia Financial Institution (LKS) is one of the sectors of Islamic economy that developed rapidly in the last few decades. This rapid development is not only driven by the worsening of the world's money economy system driven by the conventional system, but also by the religious spirit and pragmatic practical interests in developing the people's economy. Along with the development of LKS at this time of course can not be separated from the problems, one of them about the rules that regulate the LKS. There are two rules governing LKS namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The formulation of this research problem discusses how the flow chart in the religious court, how the role of KHES against material law in the settlement of sharia economic dispute in the religious court, and how to settle if there is a difference of perception between POJK and KHES to dispute sharia economy that enter in religious court. This type of research is a type of juridical legal research empirical and using a qualitative method approach. The location of this research is in Boyolali Religious Court.

Keyword: Synchronization, Regulation, Sharia Economic Dispute.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja tidak lepas dari permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Terdapat dua aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, adanya perbedaan definisi pada masing-masing aturan tersebut akan menimbulkan permasalahan di sektor lembaga keuangan tersebut bila terjadi permasalahan yang akan di timbulkan. Sebelum masuk dalam pembahasan penulis akan menjelaskan secara singkat apa yang di maksud dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (POJK) menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES)¹ adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau todak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menggunakan angka tetapi kata-kata, gambar serta informasi yang terjadi secara ilmiah dan tidak dimanipulasi. Dalam hal ini adalah dengan melakukan penelitian tentang penyelesaian yang digunakan oleh pejabat hukum bila terjadi sengketa yang melibatkan KHES dan POJK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2008

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm, 3

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primair dilapangan. Sumber data yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui proses wawancara. (oleh Hakim Pengadilan Agama yang bernama Dra. Hj. Dzakiyatun, SF.SH. Pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Boyolali). Sedangkan data sekunder berupa dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literature-literature yang berkaitan dengan objek penelitian. (UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang KHES, UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UUD 1945, UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ketua pengadilan yang disesuaikan dengan sumber data. Teknik analisis data yang dipergunakan yakni dengan menggunakan logika deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Alur Perkara Gugatan/Permohonan Pada Pengadilan Agama

Bahwa dalam mengajukan gugatan dalam pengadilan agama pada dasarnya menggunakan dasar HIR yang mana seperti yang di gunakan oleh Pengadilan Negeri untuk dasar mengajukan gugatan maupun permohonan perkara tersebut. Pertama-tama Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Setelah sampai di pengadilan Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Setelah itu Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis

dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun catatan bagi pihak berperkara sebagai berikut : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 – 281 RBg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Bilamana dianggap pihak berperkara telah memahami dari penjelasan oleh petugas meja pertama itu lalu Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). Setelah dari meja pertama maka Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Lalu Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Selanjutnya Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada

pemegang kas. Selanjutnya pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Setelah dari pemegang kas telah memeriksa seluruhnya maka Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Selanjutnya Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Setelah di daftar selanjutnya Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

3.2 Peran KHES Terhadap Hukum Materiil Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud.

Penerbitan KHES dalam bentuk PERMA tentu lebih didasarkan pada tuntutan untuk segera melengkapi kekosongan undang-undang dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kekuatan hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur: “Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

ditetapkan Mahkamah Agung”. Dalam Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Dari paparan diatas maka PERMA dapat di sejajarkan kedudukannya dengan Peraturan Presiden yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 karena sama-sama Lembaga Negara. Dengan demikian, meski KHES masih diterbitkan dalam bentuk PERMA sudah memiliki kekuatan hukum imperatif atau mengikat dan memaksa.³ Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber materil/ substansial bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Untuk itu semua, tentunya sangat diperlukan suatu kajian normative terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang sudah ada sebelumnya. Namun hal itu saja belum mencukupi sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum di Negara kita dan pun peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah. Untuk itu kajian yang bersifat religious, sosiologis, politis, dan ekonomis akan menjadi sangat relevan karena hanya dengan melalui kajian yang demikian kita dapat memahami makna yang terkandung dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini.⁴

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim

³ Majalah Peradilan Agama, Edisi 3 tahun 2004, hlm 24

⁴ Ibid, hal. 95

pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain.

3.3 Bagaimana Penyelesaian Apabila Terdapat Perbedaan Persepsi Antara POJK dan KHES Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Yang Masuk Di Pengadilan Agama

Perkara Ekonomi Syariah yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama cakupannya cukup luas, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank yang pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyawarah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), simpanan berupa giro dan tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *wadi'ah*, pembiayaan untuk transaksi jual-beli berdasarkan *murabahah*, *salam*, *istishna*, pinjaman berdasarkan prinsip *qardh*, kegiatan pengambilan utang berdasarkan prinsip *hiwalah*, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berhargapihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transactions*) berdasarkan syariah antara lain seperti prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hiwalah*, dan asuransi (*ta'min*, *takaful*), atas prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan seterusnya.⁵

Dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Boyolali menggunakan kompilasi hukum ekonomi

⁵ Mardani, "Perluasan Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah", (Tangerang; Majalah Hukum dan HAM, Edisi 29 Tahun III September 2007), hlm.15

syariah (KHES) karena hukum materiil di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah KHES.

Dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah pedoman yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama Boyolali adalah KHES, bila dalam perkara ekonomi syariah tersebut KHES belum mengatur maka hakim dipaksa untuk menemukan hukum untuk menyelesaikan tersebut dari POJK, para ahli, kitab fiqh maupun hakim melakukan istihad.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Agama yang bernama Dra. Hj. Dzakiyatun, SF.SH. pada hari jumat tanggal 19 januari 2018 di Pengadilan Agama Boyolali menyatakan bahwa dalam mensikapi adanya perbedaan definisi antara POJK dan KHES maka hakim Pengadilan Agama mencoba untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang mana dilakukan oleh hakim adalah melihat terlebih dahulu materi dari pada perjanjian yang sudah di tanda tangani atau disepakati oleh kedua belah pihak materi yang ada tersebut menggunakan definisi atau pedoman yang ada pada POJK atau tidak, setelah terverifikasi bahwa ini benar-benar berasal dari POJK maka hakim bersangkutan akan mencoba melihat perbedaan apa saja yang terdapat pada KHES, karena dalam setiap pengambilan keputusan hakim diminta untuk menemukan hukum terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan hakim melihat terlebih dahulu perbedaan-perbedaan yang ada tersebut di bagian mana saja, apakah sudah substansial atau tidak, ketika didapati tidak substansial dan hanya masalah definisi saja, maka hakim akan memutuskan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi tersebut menggunakan POJK dikarenakan dalam akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak menggunakan POJK oleh karena itu hakim juga mengikuti peraturan yang telah mereka sepakati dalam akad tersebut tetapi hakim juga tidak menyampingkan KHES dalam perkara tersebut.⁶ Dalam saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Penulis tidak menemukan perbedaan persepsi antara KHES dan POJK di Pengadilan Agama Boyolali.

⁶ wawancara dengan Dra. Hj. Dzakiyatun, SF.SH. tanggal 19 januari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Boyolali

4. PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Segala perkara yang masuk dalam pengadilan maka dalam penyelesaiannya akan menggunakan dua (2) peraturan saja yaitu POJK dan KHES tergantung dari Hakim melihat akad perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak sebelum hakim memberikan putusan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis yang telah dikemukakan diatas, maka dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah seharusnya terdapat undang-undang yang mengatur bukan PERMA di karenakan bila PERMA yang dipakai sebagai pedoman hukum maka akan terdapat peraturan-peraturan yang lain yang juga mengatur tentang ekonomi syariah tersebut oleh karena itu akan terjadi ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah oleh karena itu lebih baik di buat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta : Kencana, 2009)

Majalah Peradilan Agama, Edisi 3 tahun 2004,

Mardani, “ Kompetensi Peradilan Agama”, (Tangerang: Majalah Hukum dan HAM, Edisi 17 tahun II, September 2006)

Mardani, “Perluasan Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah”, (Tangerang; Majalah Hukum dan HAM, Edisi 29 Tahun III September 2007)

Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang KHES,

UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UUD 1945,

UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur.

Wawancara

wawancara dengan Dra. Hj. Dzakiyatun, SF.SH. tanggal 19 januari 2018 di Kantor Pengadilan Agama Boyolali